

Agama dan Ideologi*

oleh Donatus Sermada** - Malang

Abstract

The description of the freedom of how to practice the religion in Indonesia as the author reflects on it in the light of the official documents is a stepping stone to go deeper into the important insight to the relationship between religion and ideology. The freedom of practicing the religion should be based on the correct understanding of the essential difference between religion and ideology. The author attempts to elaborate both of them separately in order to gain the genuine insight to the basic essential difference between them. The essence of religion is reflected in the line of tracing linguistic meaning of two words "agama" and "religion" back to the traditions which have provided them the frame of understanding to the meaning of these two terms. In a similar way, the meaning of ideology is depicted in the historical context of its use for the certain interest and authority. The last part of this article shows up the author's effort to pound on the unavoidable and proper relationship between religion and ideology by pointing out the process of the ideologization of religion we have to avoid of. The process of ideologization of religion can lead us to the misunderstanding of these two fields -religion and ideology - as if both of them were the same.

Keywords: agama, ideologi, kebebasan beragama, hubungan agama dan ideologi.

Salah satu isu yang menarik perhatian bagi para para pakar di bidang penelitian terhadap agama adalah hubungan antara agama dan ideologi. Apakah kedua bidang itu memiliki unsur-unsur esensial yang sama? Di mana letak perbedaan kedua bidang itu? Pertanyaan ini menjadi aktual dan penting, ketika orang berhadapan dengan campur tangan negara terhadap kehidupan beragama melalui peraturan dan undang-undang yang mengatur kebebasan beragama

* Dokumen resmi yang menjadi sumber artikel ini diangkat dari buku "Undang-Undang Dasar; Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ketetapan MPR No. 11/MPR/1978); Garis-Garis Besar Haluan Negara (Ketetapan MPR No. 1 V/MPR/1978)". Buku ini diterbitkan oleh Team Pembinaan Penatar dan Bahan-Bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia. Tebalnya 95 halaman dengan sampul depan dan belakang yang berwarna merah. Tahun penerbitan dan percetakannya dan juga nama percetakannya tidak dicantumkan di sana. Kutipan-kutipan yang ditulis dengan huruf miring dalam artikel ini dan juga penafsiran serta penjelasan resminya diangkat dari buku ini.

** Penulis adalah dosen STFT Widya Sasana Malang. Ia meraih MA di bidang filsafat dan Ilmu Perbandingan Agama pada Universitas Bonn, Jerman, dan belajar bahasa Sansekerta selama 5 semester pada Universitas Bonn.

seperti yang terlukis dalam peneropongan kebebasan beragama di Indonesia dalam terang dokumen resmi. Artikel di bawah ini menyuguhkan uraian tentang hubungan antara agama dan ideologi dengan tujuan untuk menyediakan satu kerangka dasar pemikiran yang memperlihatkan batas-batas kedua bidang itu, tetapi didahului oleh satu peneropongan yang terpisah tentang unsur-unsur esensial dalam kedua bidang itu.

1. Kebebasan beragama di Indonesia dalam terang dokumen resmi.

Pasal 29 UUD'45 negara Indonesia mengatur secara resmi kedudukan agama dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat di tanah air. Pasal 29 berbunyi: *1. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa; 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.* Dalam penjelasan resmi UUD'45 tentang pasal itu, hanya ditegaskan ayat 1. bahwa bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sementara penjelasan ayat 2 pasal 29 tidak ada. Dari pasal itu dan dari penjelasannya yang singkat, agama yang dianut bangsa Indonesia adalah agama monotheistis. Ayat 2 dimengerti sebagai pendukung ayat 1. Negara menjamin kemerdekaan penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya, tapi kemerdekaan di sini tidak diartikan sebagai satu kebebasan seluas-luasnya untuk beragama dan berkepercayaan. Kebebasan beragama dan berkepercayaan dibatasi dalam ruang lingkup kepercayaan akan Tuhan Yang Maha Esa (monotheistis).

Pasal tersebut dalam Batang tubuh UUD'45 dan penjelasan singkatnya sebetulnya sudah termuat secara padat dalam Pembukaan UUD'45. Apa yang kita kenal sebagai Pancasila tertuang di sana secara eksplisit dalam sila-silanya. Pokok pikiran dalam sila pertama ditetapkan secara resmi sebagai berikut: *"Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara Negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur."* Dengan penggabungan sila pertama dan kedua, pokok pikiran ini memang hendak membahasakan satu bentuk Negara yang menganut kemanusiaan universal yang bersifat religius (humanisme religius). Bentuk Negara seperti ini kemudian dipahami sebagai bukan Negara sekular dan bukan juga Negara agama, tetapi Negara yang beragama, yaitu Negara yang bangsa dan rakyatnya percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada tempat untuk mereka yang tidak percaya akan Tuhan Yang Maha Esa. Penganut atheis tidak diperkenankan untuk ada.

Dengan pertimbangan bahwa Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar Negara Republik Indonesia dan bahwa Pancasila perlu dihayati dan diamalkan demi kesatuan bahasa, kesatuan pandangan dan kesatuan gerak langkah, Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam sidang paripurnanya yang kelima 21-25 Maret 1978 memutuskan untuk menetapkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Isi dari sila pertama dalam pedoman itu seperti tersurat dalam bab II angka 1 ialah, bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tetapi isi ini dilengkapi lagi dengan beberapa pedoman praktis seperti saling hormat-menghormati antara para pemeluk agama dan kepercayaan, saling berusaha untuk menciptakan kerukunan dan menghormati kebebasan untuk menjalankan ibadah tanpa memaksakan satu agama dan kepercayaan kepada orang lain.

Penjelasan resmi tentang bab II angka 1 dalam pedoman itu sudah bernada lain. Bunyinya demikian: “ *Dengan rumusan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa seperti tersebut pada bab II angka 1 tidak berarti bahwa Negara memaksa agama atau suatu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebab agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu berdasarkan keyakinan, hingga tidak dapat dipaksakan dan memang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri tidak memaksa setiap manusia untuk memeluk dan menganutnya.*” Rumusan dalam penjelasan resmi ini justru memberi ruang seluas-luasnya untuk kebebasan beragama, malah di dalam Negara seperti ini ada tempat untuk mereka yang tidak beragama dan yang tidak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kebebasan beragama, demikian penjelasan resmi lebih lanjut, merupakan salah satu hak asasi, dan hak asasi ini tidak berasal dari Negara atau dari pemberian golongan tertentu, tetapi martabat manusia sendiri sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa berarti bersikap “tidak memaksa setiap manusia untuk memeluk dan menganutnya.”

Tetapi penjelasan resmi sila pertama dalam P4 ini ditafsir lagi dalam Tap. MPR No. IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara. Bab IV Pola Umum Pelita Ketiga – pelita ketiga meliputi jangka waktu 1 April 1979 sampai dengan 31 Maret 1984 – berbicara tentang “Arah Dan Kebijakan Pembangunan”, yang meliputi antara lain “Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sosial Budaya.” Dalam bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, butir f menegaskan: “*Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak merupakan agama. Pembinaan terhadap kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dilakukan: (a) Agar tidak mengarah pada pembentukan agama baru. (b) Untuk mengefektifkan pengambilan langkah yang perlu agar pelaksanaan kepercayaan*

terhadap Tuhan Yang Maha Esa benar-benar sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab." Arah dan kebijaksanaan pembangunan pada Pelita tiga sehubungan dengan butir f ini tentu berdampak kuat pada berbagai macam aliran kepercayaan dan mungkin juga pada agama-agama tradisional yang ada di tanah air. Mereka tidak bisa disebut agama. Pembinaan terhadap mereka diarahkan kepada usaha masuknya mereka ke dalam salah satu agama resmi yang ditetapkan pemerintah.

Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1965, yang kemudian diundang-undangkan dalam UU No. 5 Tahun 1979, menyebut Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu sebagai agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia. Tetapi para penganut Konghucu sejak saat itu belum diterima sebagai agama resmi. Mereka baru mengecapi kebebasan beragama pada Januari tahun 2006, ketika pemerintah mengumumkan Konghucu sebagai agama resmi di tanah air. Maka, sekarang terdapat enam agama yang diterima secara resmi untuk hidup di bumi Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Para penganutnya dapat membubuhkan nama agamanya dalam KTP-nya.

Menurut laporan kebebasan beragama internasional 2006 yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tentang Indonesia, Badan Pusat Statistik Indonesia sesuai sensus tahun 2000 menyebut bahwa 88,2 persen penduduk Indonesia menganut Islam, 5,9 persen Protestan, 3,1 persen Katolik, 1,8 persen Hindu, 0,8 persen Buddha, dan 0,2 persen lain-lain seperti aliran Kepercayaan, beberapa kelompok Kristen lain dan agama Yahudi.¹ Jumlah penganut Konghucu tidak diketahui pasti ketika sensus ini dibuat, karena para responden pada waktu itu tidak boleh mengidentifikasikan diri dengan penganut Konghucu yang belum diterima sebagai satu agama resmi. Jumlah penganut Konghucu bertambah setelah pemerintah menerima Konghucu sebagai agama resmi, dan dikatakan bahwa 95 persen penganut Konghucu adalah warga keturunan Tionghoa dan yang sisanya dari kalangan suku Jawa. Perhitungan di atas didasarkan pada 201.241.999 responden, sementara Badan Pusat Statistik memperkirakan bahwa ada 4,6 juta penduduk yang tidak tersensus. Menurut sebagian kelompok Kristen, Hindu dan penganut agama minoritas lain, sensus itu tidak akurat, karena jumlah non-muslim masih lebih tinggi dari pada yang ditetapkan menurut hasil sensus itu.

¹ Laporan Kebebasan Beragama Internasional 2006 dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tentang Indonesia. Laporan itu terdiri dari bagian 1 dan 2 dan diperoleh dari akses internet: Bagian pertama diakses 31 Oktober 2006, pk.2.45: http://www.usembassyjakarta.org/bhs/Laporan/laporan_kebebasan_b, hlm.1-9, dan bagian kedua diakses 3 Nopember 2006, pk.1.45 dengan website yang sama, hlm 1-10.

Bila kita memetik butir-butir penting dari keseluruhan dokumen itu tentang kebebasan beragama, maka kita boleh berkata bahwa kebebasan beragama di negeri ini dijamin dalam batas-batas tertentu yang telah digariskan pemerintah. Setiap penduduk wajib menganut salah satu agama resmi yang ditetapkan pemerintah, dan agama resmi itu harus berada dalam koridor percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Agama-agama resmi itu (Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu) diharuskan untuk tunduk pada Departemen Agama dan peraturan-peraturannya. Agama tradisional dan kepercayaan-kepercayaan lain di luar agama resmi itu dimasukkan pemerintah dalam kategori kebudayaan dan pariwisata. Dengan demikian secara politis pemerintah – dalam hal ini departemen agama – menentukan apakah gerakan keagamaan dan kepercayaan tertentu boleh dikategorikan sebagai agama atau tidak.

Kerangka hukum yang demikian dengan sendirinya membawa dampak tertentu pada kehidupan praktis. Kehidupan beragama harus berjalan dalam bingkai kegiatan dan penghayatan keenam agama resmi itu. Hubungan antara penganut-penganut agama resmi harus diatur oleh Negara, bahkan gerakan-gerakan religius di dalam tubuh satu agama resmi juga perlu mendapat pengawasan dan penetapan dari pemerintah. Bukanlah hal yang mustahil bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil pemerintah dalam kerangka hukum yang demikian dapat saja membuahkan diskriminasi dan pelecehan agama tertentu. Penganut-penganut agama di luar agama resmi mengalami kesulitan dalam pendaftaran pernikahan atau pendaftaran kelahiran anak mereka. Mereka dipaksa untuk mengaku dirinya sebagai penganut salah satu agama resmi atau terpaksa berpindah ke dalam salah satu agama resmi itu. Di dalam hubungan antara para penganut agama resmi, kebijakan dan peraturan pemerintah sering memberi keuntungan bagi penganut agama yang satu dan merugikan penganut agama yang lain seperti persoalan yang menyentuh pembangunan rumah ibadah. Di dalam tubuh agama sendiri, ada aliran tertentu, misalnya kasus Ahmadiyah, yang dilarang menyebarkan ajarannya di Indonesia. Malah pada bulan Februari 2006, Menteri Agama M. Maftuh Basyuni membuat pernyataan yang dikutip media massa pada waktu itu, bahwa penganut Ahmadiyah harus kembali ke Islam atau membentuk agama baru. Ahmadiyah sendiri sudah di-fatwakan oleh MUI pada tahun 1980, dan fatwa itu diperbaharui lagi pada tanggal 28 Juli 2005. Isi fatwa itu ialah bahwa Ahmadiyah bukan merupakan bagian dari Islam.

2. Agama

Bila pada bagian pertama kita menyoroti kebebasan beragama di Indonesia dalam terang dokumen resmi dan melihat sepintas kenyataan yang me-

nyentuh penghayatan kebebasan beragama di dalam kehidupan praktis, pada bagian ini kita mencoba meneliti inti sari agama itu sendiri yang menjadi milik semua agama. Kebebasan beragama menunjuk kepada manusia yang menghayati agama dengan bebas, sementara inti sari agama menunjuk kepada hakekat agama. Pertanyaan filosofis yang bergulat tentang hakekat agama ialah “apa yang menjadi esensi dari agama itu.”

Salah satu penelitian empiris yang membahas persoalan filosofis itu adalah hasil penelitian di bidang bahasa (filologis). Dua bidang bahasa yang mengulas arti dan konteks pemakaian satu kata atau ungkapan tertentu adalah bidang semantik dan pragmatik. Bidang semantik berpusat pada penelitian terhadap arti dari satu kata atau ungkapan, sementara bidang pragmatik berfokus pada penelitian terhadap konteks pemakaian kata atau ungkapan tertentu (Runggaldier, 1990: 28-29). Adalah satu hal yang menarik juga untuk meneliti aspek semantik dan pragmatik dari kata “religion” dan dari kata “agama”. Dua kata itu secara empiris berasal dari dua tradisi keagamaan yang berbeda. Kata “agama” berasal dari tradisi keagamaan Hindu, sementara kata “religion” berasal dari tradisi Yunani-Latin (Sermada, 2003). Di sini kita tidak membahas apakah terjemahan kata “religion” ke dalam “agama” tepat dan benar, tapi cuma membahas kata “agama” dan kata “religion” dalam aspek semantik dan pragmatik, dan dari situ kita bisa merefleksikan lebih lanjut apa yang menjadi inti sari dari agama.

Kata “agama” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sansekerta dengan nama “âgama”, आगम, yang secara harafiah berarti “yang sedang datang, yang sedang mendekati, yang sedang muncul” (Monier, 1990: 129). Kata “âgama” dalam struktur tata bahasa Sansekerta merupakan bentuk participium praesens dari akar kata kerja “gam”, गम, yang diberi prefiks “â”, आ. Kata “gam” berarti pergi, tetapi dengan diberi prefiks “â”, kata itu berarti datang, tiba, muncul. Itulah arti kata “âgama” dalam aspek semantiknya. Kata kerja “â + gam”, sama seperti kata kerja lain, mengenal perubahan (konyugasi), dan dalam bahasa Sansekerta perubahannya berawal dari pengenalan akan bentuk diri ketiga tunggal Praesens. Maka, kata “âgam” dalam diri ketiga tunggal praesens menjadi “âgacchati”, आगच्छति, yang berarti “dia datang”. Dari bentuk itu, orang dapat mengkonyugasikan bentuk diri pertama, kedua dan ketiga baik singular maupun plural dan juga bentuk dual untuk diri pertama (kami/kita berdua), diri kedua (kamu berdua) dan diri ketiga (mereka berdua). Kata kerja bahasa Sansekerta dikenal melalui “akar kata kerja”, dan itu berbeda dengan kata kerja dalam bahasa barat seperti bahasa Latin dengan bentuk infinitivusnya. Sebagaimana sudah disebut di atas, kata “âgama” yang berbentuk Participium Praesens dengan arti “yang sedang datang” tidak bisa berdiri sendiri dalam

kalimat; dia berfungsi sebagai kata sifat, dan karena itu, dia digabungkan dengan kata benda untuk menerangkan kata benda itu. Fungsinya dalam kalimat sesuai dengan kata benda yang diterangkannya. Misalnya, "Dia *yang sedang datang* menuju ke saya adalah muridku"; "Kami melihat ular yang *sedang muncul* dari tepi jalan".

Tetapi di dalam kamus bahasa Sansekerta, kata "âgama" tidak hanya berfungsi sebagai kata sifat dengan bentuk asli Participium Praesens, tetapi berfungsi juga sebagai kata benda dengan jenis Maskulinum. Kamus W. Monier menderetkan beberapa arti kata "âgama" sebagai kata benda: *kedatangan, pendekatan, asal-mula, kegiatan membaca, kegiatan belajar, penampakan, ilmu pengetahuan, pencapaian pengetahuan, doktrin tradisional, tradisi, karya suci, pendapatan*. Sementara itu, dalam ensiklopedi Filsafat Asia, kata "âgama" berarti *kesaksian, tradisi, makalah tradisional, kitab suci* (Carr and Mahalingam, 2000:1045). Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan agama sebagai "*kepercayaan kepada Tuhan (dewa, dsb) dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu*" (Balai Pustaka, 1989: 9). Itulah sekilas analisa semantik kata "âgama" yang harus selalu dilihat dalam struktur gramatisnya.

Kita mencoba melacak arti pragmatik kata "âgama" yang tentunya hanya dapat dipahami dalam konteks historis pemakaiannya. Kamus Monier menyebut bahwa kata itu dapat ditemukan dalam Kitab Atharva Veda, Vi, 81, 2 dan XIX, 35, 3 dalam arti "yang sedang datang dekat, yang sedang mendekati". Karena penulis menemukan kesulitan untuk memperoleh ayat itu dalam teks aslinya, maka tidaklah bisa ditetapkan kata benda yang dijelaskannya dan juga konteks cerita atau konteks pemberitaan di balik kata itu. Tetapi satu hal yang agak pasti pada zaman Veda (sampai sekitar 1000 seb.M), kata "âgama" sudah dikenal dalam konteks penyembahan dan penghormatan kepada para dewa lewat nyanyian-nyanyian, ritus-ritus, dan korban-korban. Kata itu dihubungkan dengan tradisi penyembahan dan penghormatan kepada para dewa, tradisi yang tidak terbatas pada tradisi tulisan saja tetapi mencakup juga tradisi lisan sehubungan dengan kultus dan ritus keagamaan. Tradisi ini tentu berbicara tentang tindakan-tindakan manusia yang datang berkumpul secara teratur dan tetap untuk menjalankan ritus-ritus itu melalui nyanyian, mantera dan korban persembahan untuk penyembahan kepada para dewa.

Dalam zaman Upanisad (1500-500 seb.M) dan Mahâbhârata (sekitar 1400 seb. M), kata "âgama" mendapat makna baru, yaitu kompendium ajaran atau kitab suci dari berbagai macam aliran Hinduisme seperti aliran pengikut Wisnu, pengikut Siwa, juga pengikut Sakti (Klostermaier, 1994: 69-70). Mereka melihat ajaran-ajaran mereka yang tertuang dalam kompendium itu sebagai yang memiliki

keabsahan dan kewibawaan yang sama dengan ajaran-ajaran yang terdapat dalam Veda. Kata ini tentu dihubungkan dengan situasi historis pada masa itu, ketika sekelompok murid yang datang belajar ajaran-ajaran suci duduk di sekitar kaki guru untuk mendengar atau membaca teks-teks suci. Dalam perkembangan selanjutnya terdapat spesifikasi yang membedakan kumpulan tulisan yang termasuk dalam “âgama” dan kumpulan tulisan yang tidak termasuk “âgama”. Kumpulan tulisan yang termasuk dalam “âgama” adalah kumpulan tulisan yang dijadikan sumber ajaran untuk sebagian besar penganut Visnu (*Vaisnavisme*), penganut Siwa (*Saivism*) dan penganut Sakti (*Saktisme*). Kata “âgama” lalu berarti Kitab Suci dari ketiga aliran itu. Kitab Suci ketiga aliran itu terdiri dari 108 *PanĀcarâtra* atau *Vaisnava Āgamas* yang disebut juga “*Samhitâs*”, 28 *Saivas Āgamas*, dan 77 *Āekta Āgamas* yang disebut juga *Tantras*. Karena dua kumpulan tulisan yang lain memiliki namanya sendiri, yaitu *Pancarâtra* untuk kitab suci penganut Wisnu dan *Tantras* untuk kitab suci penganut Sakti, maka orang sering menyebut “âgama” untuk kitab suci penganut Siwa. Kitab suci penganut Siwa ini (*âgamas*) terdiri dari empat bagian, yaitu pengetahuan (*jñâna*); konsentrasi (*yoga*); ritus-ritus (*krîya*) dan aturan harian (*cârya*). Dalam konteks Buddhisme, pengikut Mahayana Buddhisme mengenakan istilah “âgama” untuk ajaran dasar tradisi Theravada (Hinayana) Buddhisme (Audi, 1996: 12). Dewasa ini kata “âgamas” tidak hanya diperuntukkan bagi kitab suci yang menjadi sumber kepercayaan dan praktek-praktek berbagai macam aliran Hinduisme, tetapi juga tulisan-tulisan yang memuat bahan-bahan penting untuk studi kebudayaan India, karena di dalam bahan-bahan itu ditemui informasi tentang pembangunan kuil-kuil dan tata cara pesta rakyat. G. S. Murti menyebut “âgama” sebagai “*Sâdhana Ūâstra*” (tulisan tentang tata cara atau praktek). Dia berkata:

“The Āgama is fundamentally a Sâdhana Ūâstra...it prescribes a particular way of life and a practical course of self-discipline in conformity with the theoretical teachings of its philosophy. It also governs, to a considerable degree, the forms of worship performed in the temples and the forms of rituals performed in the homes... For the past hundreds of years the Vedic sacrifices or *yajnas* have largely given place – specially in South India – to resplendent rituals of temple-worship based on the Āgamas” (Klostermaier, 1994: 70).

Berdasarkan kepustakaan Hindu-Jawa yang memberitakan bahwa agama Hindu-Siwa Buddha bercampur Tantra masuk pertama dan menyebar di Jawa pada awal abad Masehi, maka bisa dimengerti bahwa term agama yang bermaknakan Hindu-Siwa Buddha menyebar luas di bumi Indonesia dan tidak diganti dengan kata Arab “*dîn*”, yang berarti juga agama, ketika Islam berkembang pesat di bumi Indonesia (Hadiwijono, 1983: 25). Dewasa ini kata agama tidak lagi menjadi milik eksklusif tradisi Hindu, khususnya Hindu Siwa.

tetapi menjadi milik bersama bangsa Indonesia dan masuk dalam perbendaharaan bahasa baku dalam bahasa Indonesia. Kata itu lalu menunjuk kepada kepercayaan yang melibatkan segala macam kultus penghormatan dan persembahan kepada apa yang dipercayai itu.

Kata "religion" dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin "religio". Studi bahasa dan sejarah agama menemukan asal usul kata "religio" dalam tulisan-tulisan Cicero (106-43 seb. Masehi). "Religio" berarti "pemerhatian yang teliti terhadap apa yang termasuk dalam kultus para dewa" (Lanczkowski, 1991: 21). Dia mengasalkan kata itu dari kata kerja "legere" dan kata depan "re", dan keduanya digabungkan menjadi "re + legere" yang berarti membaca kembali, memperhatikan secara teliti. Dengan demikian, kata bendanya "religio" berarti usaha untuk membaca kembali atau memperhatikan kembali secara teliti semua hal yang termasuk dalam kultus terhadap para dewa.

Sejak zaman kekristenan sejalan dengan usaha sistematisasi iman kristiani melalui satu disiplin ilmu baru, yaitu Teologi, apa yang termasuk dalam kultus terhadap para dewa ditafsir secara teologis dan kristiani. Kata "religio" diartikan secara teologis. Lactansius (circa 230), seorang penulis Kristen dan ahli di bidang retorika, menafsirkan kata "religio" secara etimologis dari "re" dan kata kerja "ligare" yang berarti mengikat kembali. "Religio" lalu berarti tindakan untuk mengikat kembali hubungan manusia dengan Tuhan oleh karena terputusnya hubungan manusia dengan Tuhan akibat dosa manusia. Kemudian Agustinus (354-430) dalam karyanya "De Civitate Dei" melihat kata "religio" dari kata "re" dan kata kerja "eligere" (memilih); religere berarti memilih kembali. Dengan demikian, kata "religio" menurut penafsiran Agustinus yang turut merangkum juga pengertian Lactansius berarti satu tindakan pemilihan kembali atau satu perbuatan "memilih kembali" Allah, dan dengan tindakan itu, jiwa manusia "diikat kembali" dengan Allah, karena dosa manusia telah memutuskan hubungan manusia dengan Allah.

Aspek pragmatik kata "religio" dapat ditelusuri dalam konteks historis pemakaiannya. Satu uraian rinci tentang konteks historis pemakaian kata ini tentu tidak dibuat, tetapi satu gambaran umum tentang makna kata itu dalam konteks historis pemakaian kata itu dapatlah dikatakan demikian. Pada zaman Yunani kuno, kata "religio" bermaknakan tindakan kultis manusia untuk menghormati para dewa seperti yang ditunjuk oleh Cicero. Beberapa istilah bahasa Yunani yang memiliki arti yang berbeda seperti "eúsébeia" (takut akan Allah dan kesalehan); "thrêskeia" (hukum religius dan kebaktian); "sébas" (rasa malu yang suci); "latreîa" (pelayanan, penghormatan kepada para dewa) sering diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dengan kata "religio". Meskipun demikian, unsur hakiki yang terdapat dalam istilah-istilah itu sama, yaitu tindakan kultis

manusia dalam hubungannya dengan para dewa. Tetapi pemahaman ini mendapat nilai teologis dalam sejarah kekristenan hingga kini. Sejalan dengan paham monotheistis yang menjadi keyakinan kristiani –kemudian diperkuat dengan munculnya Islam – hal esensial dalam istilah “religio” itu mengandung arti kepercayaan akan Allah yang esa. Kata Indonesia “agama” yang menterjemahkan kata Latin “religio” lalu mengandung arti yang sama, yaitu kepercayaan akan Allah yang Esa.

Zaman pencerahan dan pengaruh ilmu pengetahuan pada masa modern hingga kini membuka wawasan baru untuk memahami makna istilah yang disebut agama sebagai terjemahan dari kata “religio”. Apa yang menjadi inti sari dari agama tidak selamanya diartikan secara teologis dalam arti kepercayaan akan Allah. Analisa filosofis dan penelitian ilmiah terhadap fenomena-fenomena religius menghasilkan pemahaman yang berbeda-beda tentang inti sari dari agama. Pengikut aliran filsafat Feuerbach berbicara tentang hakekat agama sebagai hasil proyeksi kesadaran manusia, sementara penganut aliran theistis melihatnya sebagai perwahyuan diri Allah dan jawaban manusia terhadap perwahyuan diri Allah itu. Di bidang ilmu pengetahuan, misalnya sosiologi melihat agama dalam kaitannya dengan masyarakat, sementara psikologi melihat agama dalam kaitannya dengan pengalaman kejiwaan manusia. Hipotesis tentang hakekat agama dalam bentuk teori berbeda satu sama lain karena titik tolak pendekatan mereka juga berbeda.

Meskipun terdapat perbedaan pemahaman tentang apa yang menjadi inti sari agama baik dalam hasil analisa filosofis maupun hasil penelitian ilmiah, semangat zaman pencerahan yang menekankan kebebasan berpikir dan kebebasan penelitian ilmiah membawa angin segar. Adalah ilmu pengetahuanlah yang memalingkan perhatiannya dari persoalan tentang hakekat agama kepada penelitian terhadap “manusia yang menghayati agama”, dan hal ini dilandasi oleh konsep dasar filosofis “humanisme universal” yang bergulat tentang fenomena-fenomena religius yang berhubungan dengan manusia yang menghayatinya. Penelitian ilmiah yang bertumpu pada konsep humanisme universal menghasilkan penemuan terhadap hal-hal universal yang melekat dalam semua agama, bahkan dalam praktek mereka yang menyebut diri sebagai orang yang tidak beragama dan juga orang-orang agnostik. Hal-hal universal itu adalah bahwa ada elemen “kepercayaan” atau iman” dalam istilah agama, malah dalam diri orang-orang ateistis pun ada kepercayaan atau iman tertentu yang mereka hayati sehingga mereka pun tergolong dalam orang yang mempunyai agama tertentu. Hal universal lain adalah bahwa bagaimana pun juga kepercayaan atau iman itu mempunyai sasarannya, dengan kata lain, kepercayaan harus berhubungan dengan “apa yang dipercayai”. Agama tidak

lain dari pada kepercayaan akan sesuatu yang diyakini, dan kepercayaan itu diungkapkan dalam tindakan manusia seperti kultus, ritus, kebiasaan, doa dan sebagainya untuk membangun relasi dengan apa yang dipercayai itu. Sasaran kepercayaan itu dalam bahasa filsafat adalah apa yang termasuk dalam bidang meta-empiris atau bidang "metafisis" atau dalam bahasa religius populer bidang adikodrati (supranatural) yang oleh sementara ahli di bidang sejarah agama disebut sebagai "Yang Kudus" (das Heilige). Penelitian ilmiah Mircea Eliade di bidang sejarah agama membawa satu kesimpulan yang memperluas konsep filosofis tentang manusia dalam bingkai humanisme universal menjadi humanisme universal religius. Gagasan dasarnya ialah bahwa manusia itu adalah "homo religiosus", karena bidang meta-fisis yang bersifat kudus merupakan bagian hakiki dari eksistensi manusia, bagian yang senantiasa "menampakkan diri" (revelasi, wahyu, epifani, inspirasi atau yang semacam) pada manusia dalam ruang dan waktu, meskipun secara eksplisit bidang "meta-empiris" itu diungkapkan dalam ideologi sekular tertentu yang menggerakkan tindakan dan perbuatannya.

Dalam kehidupan praktis, manusia modern yang dijiwai oleh kebebasan justru mendapat tempat untuk menghayati kebebasan beragama dan berkeyakinan. Berbagai macam agama dan keyakinan, bahkan aliran-aliran dalam tubuh agama sendiri atau aliran-aliran agnostik dan atheistic dengan semangat itu memperoleh hak untuk hidup. Pluralisme agama dan keyakinan merupakan satu keniscayaan. Dengan demikian, semangat kebebasan itu bisa membawa dampak pada melunaknya sikap para penganut agama tertentu untuk mengklaim agamanya sebagai agama yang benar. Muncul juga kesadaran para tokoh agama atau orang-orang yang mempunyai otoritas dalam institusi keagamaan tertentu untuk tidak mudah menjadikan diri sebagai otoritas tertinggi yang menetapkan apakah tradisi kepercayaan tertentu itu adalah agama atau tidak, sesat atau tidak sesat.

3. Ideologi.

Setelah berbicara tentang agama, pada bagian ini kita menyoroti kata "ideologi". Ideologi secara sederhana berarti ilmu tentang ide. Apa yang kita ketahui tentang "ide"? Menurut Plato, ide merupakan satu terminus umum atau istilah untuk mengungkapkan hasil pengenalan teoretis akan sesuatu (Ricken, 1993: 61-65). Pengenalan atau pengetahuan (Erkenntnis) sendiri merupakan satu penglihatan rohaniah atau satu tontonan rohaniah (geistige Schau). Apa yang dikenal atau apa yang dipandang adalah wujud atau hakekat yang dilambangkan dengan "X". Pengetahuan berarti hasil pengenalan akan

“apa itu X”. Hakekat sesuatu adalah sesuatu di dalam dirinya. Karena hakekat sesuatu tidak dapat dikenal secara langsung, maka hakekatnya hanya dikenal melalui ide tentangnya. Dengan demikian mengenal ide berarti mengenal hakekat, memandang ide berarti memandang hakekat. Ide lalu merupakan satu yang tidak berubah, primer dan melekat dalam hakekat itu sendiri. Untuk mengenal ide yang menunjuk kepada hakekat, Plato menawarkan metode pengenalan yang disebutnya “dialektika”.

Pengertian ideologi muncul pada awal zaman pencerahan abad 17 dan pemahaman tentangnya makin lama makin jelas pada abad ke 18 sampai pada pemahaman dalam bentuk yang sangat menentukan di bawah filsafat Marx pada abad 19 (Welte, 1980: 81-97). Francis Bacon pada tahun 1620 dalam salah satu karyanya menulis tentang tiga jenis idola dan bukannya ide. Tetapi dalam uraiannya, berbicara tentang idola erat berhubungan dengan pertanyaan kritis subyek tentang ide-ide tertentu yang dipandang sebagai idola. Ide yang pada saat itu dimengerti sebagai pengetahuan atau pengenalan akan obyek tidak diterima dari sendirinya sebagai ide yang benar. Satu ide harus diuji kembali secara kritis apakah ide tersebut benar. Karena itu seiring dengan kesadaran subyek di bawah kuasa akal budi ide tentang obyek yang diselidiki kembali menjadi sasaran bagi kritik rasional akal budi manusia. Ide tentang sesuatu hal dipertimbangkan kembali secara kritis. Dampaknya juga bisa ditemukan pada kritik agama, ketika ide-ide tentang agama yang selama itu diterima sebagai yang harus dipercayai pada gilirannya mendapat sorotan kritis dari rasionalitas manusia.

Pada abad 18, tepatnya pada tahun 1796 istilah “ideologi” muncul pertama kali dalam ceramah yang dibawakan oleh A.L.C. Destutt de Tracy. Ia mengemukakan ikhtisar satu ilmu pengetahuan baru yang disebutnya ideologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang ide. Sasaran dari ilmu pengetahuan ini ialah bahwa semua ide bukanlah sesuatu yang tabu untuk diteliti kembali secara kritis, tetapi berkedudukan sebagai obyek yang perlu mendapat pertanggungjawaban kembali oleh akal budi manusia apakah ide-ide itu benar. Dan rujukan untuk menguji apakah ide-ide itu benar adalah tanggapan pengalaman indrawi, khususnya Physiologi yang dipandang sebagai pengetahuan tentang dunia fisik dengan basis pada pengalaman indrawi. Semua ide perlu diteliti kembali apakah ide-ide itu berbasiskan pada pengalaman indrawi, dan pengolahan kritis rasional terhadap tanggapan pengalaman indrawi itulah yang merupakan proses pengenalan ide. Maka, ilmu pengetahuan tentang ide atau ideologi haruslah mengikuti satu metode eksata (ketepatan) yang dipakai dalam ilmu pengetahuan alam agar supaya kedudukan ideologi sebagai ilmu bisa menyamai ilmu pengetahuan alam. Munculnya pemahaman ideologi seperti inilah yang

menanamkan benih-benih sikap kritis untuk menguji kembali ide-ide tentang agama.

Karl Marx pada abad ke 19 memberi bentuk yang menentukan pada pemahaman tentang ideologi. Pemahamannya tentang ideologi bertolak dari pengalaman keterasingan (alienasi) manusia dari dirinya sendiri. Pengalaman keterasingan ini terjadi dalam realitas kehidupan konkrit yang tidak disadari, karena realitas kehidupan konkrit yang tidak disadari itu adalah realitas kehidupan yang menindas dan memeras manusia, dan dalam hal ini situasi pertentangan kelas antara kelas pemegang modal yang memeras dan kelas proletariat yang diperas. Dalam situasi penindasan seperti ini, Karl Marx mengamati bahwa struktur masyarakat yang ditentukan oleh kegiatan ekonomi itu dilandasi juga oleh ideologi yang melanggengkan situasi penindasan itu, termasuk agama. Ideologi lalu merupakan hasil dari kesadaran palsu akan situasi penindasan. Agama dimengertinya sebagai satu ideologi yang turut membiuskan kesadaran masyarakat sedemikian sehingga tidak ada usaha revolusioner untuk keluar dari situasi keterasingannya. Sampai pada fase itu, ideologi adalah hasil ilusi yang menjauhkan manusia dari realitas kehidupannya yang tidak manusiawi, dan untuk membongkarnya menurut Marx diperlukan aksi revolusioner yang tumbuh dari kesadaran baru akan situasi keterasingan. Bernhard Welte mempertajam konsep Marx dan menunjukkan pengaruh pemahaman Marx tentang ideologi pada masyarakat industri dewasa ini: "Ideologi dimengerti sebagai satu sketsa atau ikhtisar pemikiran ilusif manusia sendiri, ikhtisar pemikiran manusia yang bergantung pada kepentingan pengalaman keterasingan masyarakat" (Welte, 1980: 92).

Aliran pemikiran positivistic menjernihkan kembali pengertian yang agak negatif itu dari Karl Marx dan menempatkan satu konsep tentang ideologi secara agak netral. Ideologi merupakan hasil kegiatan kesadaran subyek baik perorangan maupun masyarakat dalam relasi subyek dengan realitas obyek di luarnya, tetapi hasil kegiatan itu hanyalah berupa hasil pemikiran subyek yang kurang mengungkapkan realitas obyektif. H. Kelsen, seorang penganut aliran positivistic, mengartikan ideologi sebagai "satu perlukisan terhadap obyek, satu perlukisan yang bersifat tidak obyektif, yang dipengaruhi penilaian subyektif, satu perlukisan yang menutupi obyek pengenalan, satu perlukisan yang menjelaskan atau mengaburkan pengenalan itu sendiri." (Welte, 1980: 96). Setiap perlukisan tentang realitas obyektif bagaimana pun juga memiliki karakter subyektif, dan karena itu satu ideologi condong menunjuk pada hasil penalaran subyek yang berasal dari kepentingan subyek dan seringkali mempunyai arti penting untuk masyarakat. Pada gilirannya ideologi berkembang menjadi satu sistem pemikiran yang dapat menjadi satu prinsip yang memberi arah dan tujuan

bagi kehidupan masyarakat atau bangsa. Ideologi akhirnya merupakan satu keniscayaan untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat atau negara. Ideologi menampilkan tiga sosok utama dalam fungsinya: mengintegrasikan dan membenarkan satu tata urutan sosial dalam masyarakat; mempertahankan status quo serta establishment yang sudah ada dan enggan untuk menyumbangkan semangat perubahan; melegitimasi kekuasaan dan sistem sosial yang ada dalam masyarakat (Kearney, 1990: 126-135). Negara Indonesia sendiri berdiri di atas satu ideologi, yaitu ideologi Demokrasi Pancasila.

4. Antara agama dan ideologi

Kekerasan dan kerusuhan sosial yang bernuansakan agama seperti terjadi di bumi Indonesia memunculkan kembali diskusi lama yang kini tampil lagi di bidang akademis, yaitu diskusi tentang hubungan antara agama dan ideologi. Diskusi itu berkisar tentang kebenaran agama (Kearney, 1990: 126). Teori-teori kritis modern melihat kebenaran agama yang diajarkan dalam agama sebagai kasus paradigma ideologi yang sering dimengerti secara negatif. Kebenaran agama lalu identik dengan ideologi religius yang menjelma dalam satu sistem ide tentang agama, satu sistem ide yang tidak mengungkapkan realitas kehidupan yang konkrit. Dan bila kebenaran agama itu identik dengan ideologi religius, maka formulasi kebenaran itu bisa saja merupakan satu ideologi yang bertumbuh keluar dari satu kesadaran palsu yang oleh Marx harus dibongkar kembali oleh satu kesadaran yang benar akan realitas hidup konkrit.

Untuk menghindarkan identifikasi kebenaran agama dengan ideologi, kita perlu mengenal unsur esensial di dalam agama. Unsur esensial ini merupakan kriteria yang membantu kita untuk menjernihkan persoalan identifikasi itu yang membuat kita menyamakan begitu saja agama dengan ideologi religius. Unsur esensial dalam agama adalah "iman atau kepercayaan" di satu pihak, dan "sasaran iman" yang menjadi milik dari dunia "meta-empiris" di lain pihak. Elemen esensial kedua – sasaran iman – itulah yang membuat manusia berbeda mem bahasakannya (Allah, dewa, satu gagasan, ideologi, roh-roh dsb.). Penelitian sejarah agama dan ilmu pengetahuan tentang agama mem bahasakannya sebagai "Yang Kudus", yang menampakkan diri dalam ruang dan waktu dan disikapi secara berbeda oleh manusia. Maka, unsur esensial lain yang melekat pada "Yang Kudus" adalah bahwa Dia sendiri "menampakkan" Diri secara bebas. Meskipun penampakkan itu dilukiskan secara berbeda dengan sebutan: wahyu, epifani, revelasi, inspirasi, inkarnasi, penjelmaan, dsb., namun penampakkan itu sendiri menunjuk kepada inisiatif dan aktivitas Yang Kudus sendiri, dan dengannya manusia "harus" menjawabNya. Dengan elemen yang disebut terakhir ini, agama lalu merupakan kepercayaan manusia akan Yang

Kudus dan jawaban manusia akan penampakkan Yang Kudus itu. Pemahaman seperti inilah yang membuat manusia menguji selalu apakah ada unsur "wahyu" dalam aliran keagamaan atau aliran kepercayaan tertentu, dan sekaligus juga menolak otoritas manusia sebagai otoritas tertinggi untuk mengadili aliran kepercayaan tertentu apakah dia agama atau tidak.

Akan tetapi persoalannya ialah bahwa bagaimana kita mengenal wahyu dalam agama. Bagaimana kita menangkap dan memformulasikan proses penampakan Yang Kudus itu dalam ruang dan waktu? Bernhard Welte membedakan unsur batiniah-hakiki dan unsur lahiriah-sekunder satu agama (Welte, 1980: 98-100). Unsur batiniah-hakiki satu agama adalah unsur esensial yang disebut di atas, dengan kata lain, unsur batiniah-hakikinya adalah pengalaman iman akan penampakkan Yang Kudus dan jawaban manusia akan penampakkan itu. Di dalam pengalaman iman itulah terletak kebenaran agama. Tetapi unsur batiniah-hakiki hanya bisa dikenal dan diungkapkan melalui unsur-unsur lahiriah-sekunder. Kebenaran agama hanya bisa ditangkap melalui unsur-unsur lahiriah-sekunder. Unsur-unsur lahiriah-sekunder itu lalu merupakan bentuk jawaban manusia akan penampakkan Yang Kudus, dan bentuk-bentuk itu ditampilkan melalui formulasi atau bahasa-bahasa iman (teologi), ritus-ritus, simbol-simbol, sistem ajaran, doktrin, dsb. Meskipun bentuk-bentuk jawaban itu bukanlah unsur hakiki dalam agama, tetapi mereka sangat dibutuhkan untuk menyadarkan kembali para penganut agama agar para penganut agama selalu kembali kepada pengalaman asli iman mereka.

Dengan demikian, unsur-unsur lahiriah-sekunder, jika tidak dikonfrontasikan dengan pengalaman iman yang hidup-hidup melalui refleksi dan penafsiran yang terus menerus terhadapnya, akan terjebak ke dalam ideologi. Malah, kita boleh berani mengatakan bahwa agama adalah ideologi, ketika unsur-unsur lahiriah-sekunder seperti formulasi iman, ritus-ritus, simbol-simbol, sistem ajaran dan doktrin-doktrin menjadi kriteria utama untuk menilai pengalaman iman perorangan atau kelompok sosial tertentu. Argumentasinya ialah bahwa di dalam semua unsur lahiriah-sekunder agama terdapat kepentingan-kepentingan tertentu, kekuasaan dan otoritas manusia serta sistem berpikir tertentu, semuanya yang memainkan peranan utama untuk menunjang keberadaan agama tertentu tetapi sering terasa asing dari realitas pengalaman iman asli perorangan atau kelompok. Agama yang dalam penghayatannya mengutamakan unsur-unsur lahiriah-sekunder jelas menjadi satu ideologi yang telah kehilangan unsur esensial agama sendiri. Ketika terjadi kerusuhan di Ambon, baik kelompok Islam di bawah panji "laskar jihad" maupun kelompok kristen di bawah panji "serdadu Kristus", atau juga ketika terjadi bom bunuh diri yang dimotivir oleh mati syahid, tindakan-tindakan seperti itu bukan mengungkapkan satu

penghayatan agama sejati, tetapi mengungkapkan dominasi ideologi religius yang merasuki tindakan.

Untuk mempertajam pemahaman kita tentang perbedaan mendasar antara agama dan ideologi, kita menampilkan tiga hal penting yang mengaburkan esensi agama melalui apa yang disebut "proses ideologisasi agama" (Welte, 1980: 100-103). Tiga hal penting itu adalah proses ideologisasi agama melalui fungsionalisasi agama, melalui ideologi estetis dan melalui absolutisasi agama.

Proses ideologisasi agama melalui fungsionalisasi agama berarti proses untuk menjadikan agama sebagai alat untuk mengejar kekuasaan dan kepentingan. Manusia memperlakukakan agama untuk tujuan lain di luar bidang agama. Melalui proses ini, agama lalu menjadi satu alat ideologis untuk mencapai satu tujuan yang tidak agamawi. Keberadaan agama hanya berarti, sejauh agama berfungsi untuk melayani kepentingan dan kekuasaan dengan maksud untuk mengejar cita-cita tertentu di luar agama. Berbagai macam partai politik yang berbasiskan agama berada pada jalur ini, yaitu demi kepentingan, kekuasaan dan tujuan politiknya agama dimanfaatkan. Maka, proses fungsionalisasi agama membuat agama identik dengan ideologi religius.

Proses ideologisasi agama melalui ideologi estetis berarti proses untuk menjadikan agama sebagai satu ideologi estetis. Ideologi estetis berakar dalam pengalaman rasa dan hasrat akan keindahan yang diwujudkannyatakan dalam kegiatan seni, dan bentuk pengungkapan rasa dan hasrat akan keindahan ini menjelma menjadi satu ideologi ketika bentuk pengungkapan itu dituntun oleh satu gagasan pikiran tertentu atau memperlihatkan satu gagasan pemikiran tertentu yang melatarbelakangi kegiatan seni. Proses ideologisasi agama melalui cara ini justru menempatkan agama sebagai yang sama dengan satu kegiatan seni, dan dalam konteks penghayatan keagamaan agama lalu identik dengan ritus-ritus, kultus-kultus, upacara-upacara atau kurban-kurban, semuanya yang berhiaskan hal-hal yang indah lewat tarian, nyanyian, sikap tubuh dsb. Kritik para nabi dalam Perjanjian Lama terhadap penghayatan agama yang menekankan ritus dan upacara kurban adalah kritik terhadap ideologi estetis yang telah melupakan unsur hakiki dalam agama, yaitu kebenaran dan keadilan yang harus bercahaya dalam agama. Manusia yang menghayati agama sejati harus mengarah kepada penegakan kebenaran dan keadilan. Rasa dan hasrat akan keindahan sejati hanya dapat dimenangkan melalui usaha untuk mengasah rasa dan hasrat untuk mengejar kebenaran dan keadilan.

Proses ideologisasi agama melalui absolutisasi agama berarti proses untuk memutlakkan keberadaan agama sebagai produk manusia semata-mata. Proses ini lebih berbahaya dari pada kedua proses di atas, karena proses ini mengabaikan dimensi transendental agama dan memutlakkan manusia sebagai pemilik

autoritas tertinggi yang mengukur kebenaran, kebahagiaan dan kekuasaan. Hasrat hakiki manusia dan usahanya untuk mencapai sesuatu yang "mutlak", entah itu kebenaran mutlak, kebahagiaan sejati, kekuasaan mutlak atau itu satu nilai mutlak, prinsip kekal, hakekat tak terbatas atau Tuhan, dihadapkan dengan pengalaman kontingensi dan keterbatasan manusia di dunia. Kenyataan yang disebut terakhir ini membuat manusia jatuh ke dalam paham relativisme dan pada gilirannya secara tidak sadar mengalihkan hasrat untuk mengejar sesuatu yang mutlak – dengan sendirinya lawan dari relativisme – kepada hasrat untuk mengejar kekuasaan tak terbatas untuk dirinya dengan segala cara. Agama-agama universal atau boleh dikatakan agama-agama besar dengan institusi yang sudah mapan pada umumnya jatuh ke dalam bahaya itu ketika mereka berhadapan dengan aliran-aliran baru dan gerakan-gerakan religius baru yang ada di dalam tubuh agamanya. Kekerasan dan kerusuhan mudah merebak melawan aliran-aliran baru, karena para penganut agama besar melalui institusinya merasa diri sudah mapan dalam pemegang kebenaran mutlak dan kekuasaan mutlak. Melalui tindakan kekerasan itu, ajaran-ajaran resmi agama tersebut kehilangan nilai transendental dan menjelma menjadi satu ideologi yang menghakimi aliran-aliran, bahkan yang melegitimasi kekerasan. Dalam iklim tersebut, kebebasan agama dan keyakinan sama sekali tidak dijamin.

5. Simpulan

Agama dan ideologi merupakan dua istilah yang memiliki makna dan hakekat yang berbeda. Peneropongan kedua bidang itu secara berbeda seperti yang dikedepankan pada bagian kedua dan ketiga memperlihatkan perbedaan esensial keduanya, meskipun keduanya seperti yang dilukiskan pada bagian terakhir berkaitan erat satu sama lain. Dalam praktek kehidupan beragama, keduanya memainkan peranan yang sering mengaburkan pemahaman yang benar tentang makna dan hakekatnya. Dan hal ini bisa terbaca pada campur tangan yang begitu besar dari negara untuk mengatur kehidupan beragama melalui peraturan dan undang-undang yang menjamin dan membatasi kehidupan beragama. Bagian pertama tentang kebebasan beragama di Indonesia dalam terang dolumen resmi melukiskan secara tidak langsung pemahaman yang kabur tentang kaitan antara kedua bidang itu.

* * * * *

Daftar Kepustakaan

- Audi, Robert., ed. (1995). *The Cambridge Dictionary of Philosophy*, New York: Cambridge University Press.
- Carr, Brian and Mahalingam, Indira, eds. (2000): *Companion Encyclopedia of Asian Philosophy*, London: Routledge.
- Hadiwijono, Harun, Dr. (1983). *Konsepsi tentang Manusia dalam Kebatinan Jawa*, Jakarta: Percetakan Kintamani Offset.
- Kearney, Richard. (1990). "Ideology and Religion: A Hermeneutic Conflict", in Guerriere, Daniel., (ed.), *Phenomenology of the Truth Proper to Religion*, Albany, NY: State University of New York Press.
- Klostermaier, Klaus K. (1994). *A Survey of Hinduism*, New York: State University of New York Press.
- Lanczkowski, Guenter. (1991). *Einfuehrung in die Religionswissenschaft*, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- Laporan Kebebasan Beragama Internasional 2006 (2006). *Indonesia*, Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakarta – Indonesia, http://www.usembassyjakarta.org/bhs/laporan_kebebasan_b, diakses pada tanggal 31 Oktober 2006 dan 3 Nopember 2006.
- Monier-Williams, Sir Monier, M.A., K.C.I.E. (1990). *A Sanskrit – English Dictionary*, Delhi: Motilal Banarsidass Publishers.
- Ricken, Friedo. (1993). *Philosophie der Antike*, Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Runggaldier, Edmund. (1990). *Analytische Sprachphilosophie*, Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Sermada, Donatus. (Maret 2003). "Agama dan Kebudayaan dalam Perspektif Filsafat Hermeneutis", *Studia philosophica et theologica*, Vol. 2 (No.2): 129-138.
- Team Pembinaan Penatar Dan Bahan-Bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia. (1978). *Undang-Undang Dasar; Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ketetapan MPR No. II/MPR/1978); Garis-Garis Besar Haluan Negara (Ketetapan MPR No.IV/MPR/1978)*.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1989). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Welte, Bernhard. (1980). "Idologie und Religion", in Sekler, Max & Welte, Berhhard & Schaeffler, Richard. (eds.), *Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft*, Freiburg: Herder.